

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: UnesaUniversity press.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek, Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amamndemen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisilis
- Nur Rohim Yunus, 2012. *Restorasi Budaya Hukum*, Jakarta : Jurisprudence Press.
- Sri Hartini, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino,1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Theo Hujbers, 1984, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

C. Jurnal

Badjuri, A., 2011, Peranan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomis (JBE)*, Vol. 18.

- Bangu, Matius, 2020, Evaluasi Sistem Passing Grade dan Faktor Disparetas Antar Daerah dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), *Jurnal Retentum*, Universitas Darma Agung, Vol. 1.
- Haryono, Priskila Fransisca, dkk, 2018, Dampak Independensi dan Produk Peraturan Hukum KPK atas Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Hukum "The Jurist"*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Vol. II.
- Heriyanto dan Sulaiman, 2020, Pelatihan Peningkatan *Skill* dan Pengetahuan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS 2020 di Kota Pontianak, *Jurnal Abdidas*, Universitas Pahlawan, Vol. 1, Nomor 5 2020.
- Atmaja, Dewa Gede, 2018, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12.
- Ira Purniawati, 2021, Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021), *Jurnal Ikamakum*, Vol. 1.
- Mellysa FW, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2.
- Parama, Jovial Falah, 2020, Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4.
- S, Tri Agus, 2020, Status Kepegawaian Ideal untuk Penyelidik dan Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang Menunjang Penegakan Hukum Anti

Korupsi, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Vol. 2.
Trisnanda, Muhammad Junaidi Fitriawan, 2021, Akibat Hukum Keberlakuan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai
Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol.4.
Wahyuningrum, Kartika S, 2020, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Benarkah Ada?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen
Satya Wacana, Vol. 4.

D. Internet

<http://kbbi.web.id/manfaat>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengalihan>

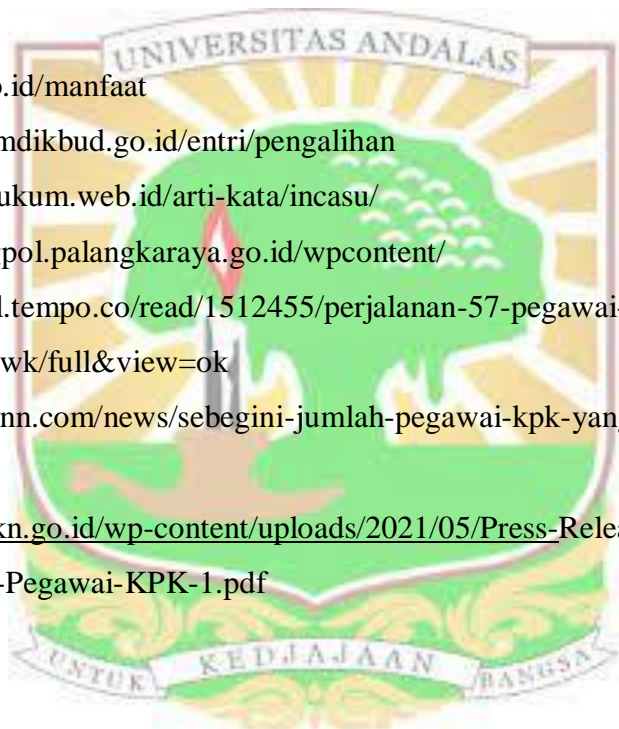
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/incasu/>

<https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/wpcontent/>

[https://nasional.tempo.co/read/1512455/perjalanan-57-pegawai-kpk-melawan
hasil twk/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1512455/perjalanan-57-pegawai-kpk-melawan-hasil-twk/full&view=ok)

[https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pegawai-kpk-yang-beralihmenjadi
asn](https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pegawai-kpk-yang-beralihmenjadi-asn)

[https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Press-Release-ttg-Asesmen-
TWK-Pegawai-KPK-1.pdf](https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Press-Release-ttg-Asesmen-TWK-Pegawai-KPK-1.pdf)



<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/31/bkn-jawab-soal-9-indikator-kriteria-merah-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531193413-12-648935/13-daftar-indikator-hijau-kuning-twk-pegawai-kpk>

<https://youtu.be/KAB9N5MqXOQ>

<https://www.suara.com/news/2021/05/07/135644/daftar-pertanyaan-tes-alihstatus-pegawai-kpk-yang-lecehkan-perempuan>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505121817-12638805/daftarlengkap-nama-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>

<https://www.suara.com/news/2019/12/28/131648/5-kasus-besar-yang-ditangani-novel-baswedan-hingga-disiram-air-keras?page=all>

